

## Esei: Seabad Bung Hatta Wafat

### YANG MEMBESARKANNYA ADALAH KESALAHANNYA

Oleh:  
Wisran Hadi

Kesalahan terbesar Bung Hatta adalah ketika dia memansuhkan pengertian kata “dwi tunggal” dengan tindakannya yang paling drastis; mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Sejak itu, dalam kamus perpolitikan Indonesia tidak lagi kata “dwi tunggal”. Kata itu dikuburkan dalam-dalam dan kemudian diganti dengan kata “dwi fungsi” untuk kelanggengan sebuah rezim sesudahnya. Bung Hatta dikatakan salah karena melakukan sesuatu yang tidak lazim. Lazimnya, seseorang yang telah menjadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, camat ataupun kepala desa, apa lagi pada masa sekarang, mereka tidak pernah mau mundur. Dengan alasan bahwa jabatan yang diberikan kepadanya adalah sebuah “amanah”, maka setiap jabatan harus dipertahankan walau gagal sekalipun. Maka, Bung Hatta dapat dikatakan tidak memegang amanah.

Orang Minang menganggap pengunduran diri itu sebagai “pangkal bala” yang menyebabkan tidak ada lagi orang Minang dipercaya untuk dipilih menjadi wakil presiden. Pengunduran diri Bung Hatta adalah sebuah “kerugian” bagi kebesaran dan martabat orang Minangkabau di dalam kancah perpolitikan. Itu suatu kesalahan. Bukankah, konon, politik Indonesia sebelumnya didominasi oleh tokoh-tokoh Minang?

Pengunduran diri Bung Hatta merupakan pula titik awal dari “keliaran” Sukarno dalam memberi warna politik Indonesia dan kehidupan berbangsa.

Keliaran Sukarno itu, atau “fauvisme” kata tokoh senirupa Prancis ketika pelukis Matisse memberikan warna hijau pada hidung seorang model lukisannya.

Liar, karena Matisse telah meletakkan warna yang “tidak lazim” pada warna yang sudah dibakukan bagi warna kulit manusia.

Kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi dibalik pengunduran dirinya itu, apakah terpaksa atau dipaksa. Ahli sejarah juga tidak sempat melakukan analisa untuk hal ini, karena peralatan analisisnya terburu diseragamkan. Tetapi yang jelas, sejak pengunduran diri itu pula ketokohan Bung Hatta dibenam dalam berbagai arena dan kancah

perpolitikan Indonesia. Bahkan, Hatta yang dikenal sebagai penyusun konsep koperasi rakyat itu, “gelar”nya sebagai Bapak Koperasi dirampas pula dengan semena-mena. Pengertian koperasi bahkan dikacaukan, disesuaikan untuk berbagai kepentingan pedagang yang dekat dengan tangan kekuasaan.

Akan tetapi, kesalahan itu pulalah yang menyebabkan Bung Hatta menjadi benar. Artinya, tindakannya mengundurkan diri itu, telah membebaskan Bung Hatta dari segala tragedi politik, sebagaimana yang pernah dialami tokoh-tokoh politik di manapun juga. Tragedi yang selalu dialami para penguasa atau tokoh-tokoh politik, adalah keruntuhan. Sukarno yang jaya akhirnya hancur sebagaimana juga kejayaan Mussolini, Hitler, termasuk juga Suharto yang berkibar-kibar atau Abdul Rahman Wahid yang berbusa-busa.

Bung Hatta tidak terlibat dengan tragedi semacam itu. Bung Hatta tidak melanjutkan karier politiknya sampai ke ujung hancurnya sebuah rezim. Dia berhenti di tengah jalan saat Sukarno menikung tajam di perjalanan. Bung Hatta secara politik selamat. Di saat Sukarno masuk ke jurang yang lebih dalam, di saat itu pula tindakan Bung Hatta mengundurkan diri yang dulu dianggap sebagai kesalahan segera dilupakan dan diganti dengan sebuah pembenaran. Apa yang dulu dianggap suatu kesalahan, kini dijadikan suatu kebenaran. Oleh karena itulah, sampai sekarang, kita tidak pernah mendengar semiangpun cacat Bung Hatta dalam karier politiknya.

Dia kemudian “diangkat” dan dijelmakan sebagai tokoh “bersih” republik ini.

Kesalahan lain Bung Hatta sebelum itu adalah ketika Bung Hatta tidak “berpihak” pada perjuangan orang Minang atau rakyat Sumatera Barat. Sebelum ketidakpuasan rakyat Sumatera Barat menjelma menjadi sosok nyata dalam bentuk sebuah pemberontakan, konon, tokoh-tokoh Sumatera Barat pernah disarankan Bung Hatta agar tidak melakukan pemberontakan. Pemberontakan akan menyebabkan negara yang waktu itu sedang menyempurnakan diri akan semakin kacau. Pemberontakan itu nantinya akan menyebabkan daerah-daerah menderita lebih parah. Kalah jadi abu, menang jadi arang.

Namun tokoh-tokoh Sumatera Barat tidak mengindahkan saran Bung Hatta. Semua orang terlibat emosi dan rasa kedaerahan yang begitu tinggi.

Bahkan Bung Hatta dianggap sebagai “orang asing” dalam konstelasi politik orang Minang waktu itu. Ternyata kemudian, apa yang dikatakan Bung Hatta itu benar, bahwa setelah pemberontakan itu Sumatera Barat hancur berkeping-keping. Bahkan lebih parah lagi;

orang Minang kehilangan pamor, tidak dipercaya, harga dirinya diinjak-injak oleh sepatu berpaku, diejek sebagai suku pemberontak.

Sampai sekarang, tak seorangpun dapat memulihkannya.

Mungkin disebabkan oleh kesalahan masa lalu itu, Bung Hatta yang dianggap tidak berpihak pada perjuangan rakyat Sumatera Barat, orang Minang menjadi tidak acuh pada Bung Hatta. Sampai kini ketidak acuhan itu masih dapat dirasakan. Dalam berbagai forum, pembicaraan mengenai Bung Hatta hanya sebatas kalangan kecil ilmuan saja, tidak merebak sampai ke kalangan orang-orang politik, apalagi kalangan agama, datuk-datuk, seniman atau budayawan.

Belum pernah kalangan agama membincang pemikiran-pemikiran Hatta, apalagi kalangan para penghulu. Juga, belum pernah Bung Hatta dijadikan “teladan” bagi para tokoh-tokoh politik Sumatera Barat sampai sekarang. Bung Hatta seakan ditempatkan pada sebuah bilik kaca. Dapat dilihat tetapi tidak untuk dipedomani.

Kesalahan lain Bung Hatta adalah karena dia orang Minang. Seandainya bukan orang Minang, mungkin Bung Hatta sudah menjadi tokoh yang dimitoskan, atau dikeramatkan pula, sebagaimana tokoh-tokoh politik lainnya dimitoskan oleh sistim budaya yang bukan Minang. Dan memang, tak ada peringatan secara nasional untuk Bung Hatta, dibanding Kartini misalnya. Tak ada seorangpun tokoh Minang mengusulkan di DPR untuk itu.

Apakah sesungguhnya yang melatar belakangi pengunduran diri Bung Hatta merupakan suatu lembaran lain dalam merenungi sebuah perjalanan seorang tokoh. Mungkin saja karena Bung Hatta itu orang Minang, lalu tindakannya dilatar belakangi oleh sifat orang Minang itu sendiri.

Seperti apa yang dikatakan budayawan A.A.Navis, laki-laki Minang itu “paganyi”, perajuk. Bila apa yang diinginkannya tidak kunjung tercapai, dia merajuk, mengundurkan diri atau pergi merantau, atau bertapa, membuang diri.

Tapi apakah kriteria demikian juga dapat diberlakukan terhadap tindakan Bung Hatta? Inipun suatu kajian tentang Bung Hatta yang menarik untuk dilanjutkan. Namun, yang tak kunjung terbantah sampai sekarang adalah, akibat dia mengundurkan diri itu, Bung Hatta menjadi bersih. Bung Hatta menjadi sebuah mercu suar dari “bersihnya” seorang tokoh politik. Tidak seperti “preman pasa” sekarang.

Tentang kebesaran Bung Hatta semua orang mengakui. Buku-bukunya, buah pikirannya, dan tindak tanduknya dikagumi. Namanya yang harum itu telah dikukuhkan untuk nama dari berbagai kepentingan. Bahkan sampai sebuah hutan rayapun, dinamakan hutan raya Bung Hatta, walaupun Bung Hatta bukan seorang tokoh kehutanan atau pertanian.

Persoalannya bagi kita sekarang adalah; benarkah semua orang, orang Minangkabau khususnya merasa berkepentingan pada Bung Hatta? Sebab, dari apa yang telah terjadi, hanya Universitas Bung Hatta saja yang sering membuat peringatannya untuk tokoh besar ini. Boleh jadi, perguruan itu karena tersangkut nama, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita tidak pernah mendengar IAIN Imam Bonjol misalnya, membicarakan pikiran-pikiran Bung Hatta, atau Unand atau Pemda Sumbar sendiri.

Ketidacuhan seperti ini dapat dijadikan indikator sementara, bahwa orang Minang, yang katanya sebagai pemilik tunggal Bung Hatta, tetapi tidak pernah memberikan penghargaan dengan semestinya. Mereka hanya menghargai jasadnya, dihiasi kuburannya, diberi bertajuk gonjong rumah Minang segala, tetapi tidak mampu menghargai apalagi melanjutkan pikiran-pikirannya. Bung Hatta yang sehari-harinya berpenampilan sederhana, namun pikiran-pikirannya dapat membangkitkan minda dan sumberdaya.

Dengan demikian, bolehlah dikatakan, orang Minang lebih menghargai penampilan daripada pemikiran.

Kurangnya penghargaan kepada Bung Hatta mungkin disebabkan pula oleh sistem demokrasi yang salah kaprah. Dalam sistem ini, suara terbanyak adalah penentu segalanya. Demokrasi mengutamakan pada suara terbanyak bukan pada pemikiran yang benar.

Dalam demokrasi, suara seorang ilmuwan, apakah dia profesor, doktor, ulama, budayawan, para penghulu, sama nilainya dengan suara seorang buta huruf, preman, pembunuh, pelacur atau pencuri. Dalam konteks ini, tentulah jumlah suara para ilmuwan tadi (termasuk Bung Hatta di dalamnya) akan kalah jumlahnya dengan jumlah suara yang lain.

Oleh karena itu pula barangkali, penghargaan terhadap pikiran-pikiran Bung Hatta tidak menyebar atau saran-sarannya tidak diterima dengan baik karena jumlah suara yang berbeda itu tadi.

Semasa hidupnya Bung Hatta adalah seorang demokrat yang kemudian menjadi korban oleh sistem demokrasi itu sendiri, seorang Minang yang terpinggir oleh orang

Minang itu sendiri. Mungkin betul juga apa yang dikatakan A.A.Navis, orang Minang sangat sulit dapat menghargai orang lain.

Akan tetapi setelah dia wafat seabad, semua orang Minang berlomba mengambil manfaat!\*\*\*

Kualalumpur, Juli 2002

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.